

## **KAJIAN DELINIASI KOTA MAMUJU**

Dewa Sagita Alfadin Nur<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Agung Podomoro, Jakarta Barat

\*Email: dewa.alfadin@podomorouniversity.ac.id

---

### **ABSTRAK**

Pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang terus berlanjut guna meningkatkan ekonomi sebuah wilayah. Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi jasa merupakan salah satu tanda pembangunan itu berkembang pesat. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan lahan untuk permukiman dan fasilitas pendukungnya dibutuhkan. Tantangan bagi pemerintah setempat untuk memberikan kebutuhan tersebut. Kabupaten mamuju merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi barat yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi selatan. Setelah pemekaran, kabupaten mamuju berbenah untuk mulai menata Kawasan perkotaannya yang akan segera menjadi ibukota provinsi Sulawesi barat. Namun, penentuan pembagian wilayah antara kota dan kabupaten tidak jelas sehingga penentuan batas wilayah kota mamuju sangat diperlukan berdasarkan kepadatan penduduk dan jangkauan pelayanan. Selain itu, penentuan fasilitas pendukung menjadi terhambat. Melalui penelitian ini, penentuan wilayah kota dan perhitungan kebutuhan pelayanan pendukung perkotaan dapat dijabarkan sehingga dapat membentuk ruang kota mamuju.

*Kata Kunci:* Perkotaan; fasilitas; bangunan; Mamuju

### **PENDAHULUAN**

Saat ini kota-kota di Indonesia mengalami perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Memasuki era reformasi, pelimpahan wewenang dari pusat telah dilimpahkan kepada daerah untuk mengurus daerah masing-masing mulai dari perencanaan, pengembangan sampai pembangunan secara fisik dengan tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kawasan perkotaan dihadapkan dalam pembangunan fisik berupa bangunan dan Gedung yang berfungsi sebagai salah satu pendukung kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan jasa. Masyarakat membangun bangunan atau Gedung sesuai kebutuhan mereka dalam beraktifitas baik dalam kegiatan pribadi ataupun kegiatan ekonomi. Namun, pembangunan tersebut memberikan dampak negatif seperti kesemrawutan, macet, ataupun banjir jika tidak diatur sesuai fungsi dan bentuknya. Pemerintah daerah wajib melakukan pengaturan dan penataan bangunan Gedung tersebut guna menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Untuk melakukan pengaturan dan penataan hingga pengawasan, maka pemerintah daerah wajib memiliki dokumen kumpulan data yang memuat daftar bangunan Gedung yang terbangun didaerahnya. Daftar tersebut memuat mengenai pemilik, fungsi, luas, dan bentuk dari bangunan Gedung yang dibangun. Bagi pemerintah daerah, Bangunan gedung sangat diperlukan sebagai salah satu sistem informasi guna mengetahui Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), penanganan asset daerah, pemetaan bangunan gedung (yang rawan ber-IMB, dll), dan penanganan yang cepat dan tepat apabila terjadi permasalahan pada bangunan gedung yang bersangkutan atau misalnya bila terjadi bencana, sehingga dapat dilakukan dengan cepat penanganannya.

Oleh karena itu, Kegiatan pendataan bangunan gedung menjadi sarana untuk penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan. Pendataan untuk bangunan gedung-baru dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan Gedung agar sesuai peruntukannya dan sesuai penempatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, pendataan tersebut akan menunjukkan batas wilayah atau deliniasi perkotaan yang kelak akan berubah menjadi kota atau pusat pertumbuhan baru. Untuk membangun kota juga diperlukan sarana dan prasarana perkotaan yang dibutuhkan untuk melayani masyarakatnya. Kabupaten mamuju juga kelak akan bertumbuh menjadi kota Mamuju yang tentunya akan membutuhkan banyak sarana dan prasarana yang harus dibangun. Kabupaten mamuju sebagai ibukota provinsi Sulawesi Barat memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan pergerakan ekonomi di jalur antar provinsi pulau Sulawesi.

### **Tinjauan Pustaka**

Morfologi diartikan sebagai ilmu untuk mempelajari bentuk fisik kota secara logis. Morfologi merupakan suatu bentuk ilmu atau pendekatan untuk memahami perkembangan kota yang terus menerus mengalami perubahan selama proses perkembangannya melalui bentuk pola dan tata ruang kota (Zahnd, 1999). Morfologi memiliki tiga komponen dalam mencermati kondisi fisik kawasan. Komponen tersebut ditinjau dari penggunaan lahan kawasan yang mencerminkan aktivitas kawasan, pola sirkulasi atau pola jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan, dan pola bangunan beserta fungsinya (Soetomo, 2009).

Penggunaan lahan dalam morfologi ditinjau dari komposisi penggunaan lahan yang mencerminkan penggunaan lahan campuran atau tidak (Burton, 2002). Penggunaan lahan merupakan salah satu komponen dalam morfologi. Karakteristik kenampakan penggunaan lahan pada wilayah pinggiran berupa lahan terbangun dengan fungsi permukiman, jasa, dan industri (Yunus, 2008). Penggunaan lahan dalam morfologi ditinjau dari komposisi penggunaan lahan yang mencerminkan penggunaan lahan campuran atau tidak (Burton, 2002).

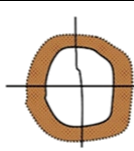
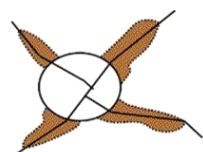
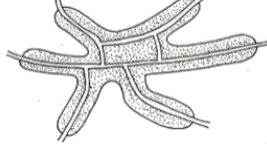
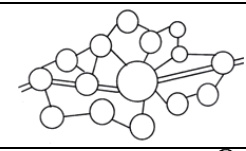
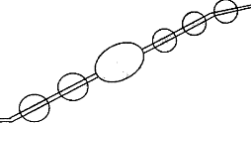
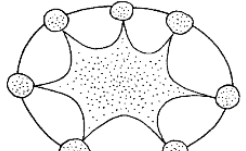
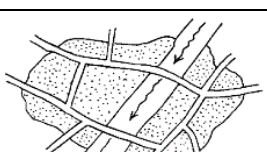
Pola jaringan jalan merupakan kumpulan jaringan jalan yang berhubungan dan membentuk suatu model. Pola jaringan jalan merupakan kumpulan jaringan jalan yang berhubungan dan membentuk suatu model. Ada 6 pola jaringan jalan yaitu pola grid, pola radial, pola cincin radial, pola spinal, pola heksagonal, dan pola delta (Morlok, 1991).

Bangunan merupakan salah satu komponen morfologi, ada 3 pola bangunan yaitu pola homogen, heterogen, dan menyebar (Zahnd, 2008). Pola bangunan tidak terlepas dari kepadatan bangunan. Kepadatan bangunan dibedakan menjadi tiga menurut (Tyas, Danial, & Izjrail, 2013) kepadatan tinggi ( $BCR > 70\%$ ), kepadatan sedang ( $50\% < BCR < 70\%$ ), dan kepadatan rendah ( $BCR < 50\%$ ). Perpaduan ketiga karakteristik komponen dapat membentuk bentuk morfologi kawasan. Bentuk morfologi kawasan tidak dapat hanya ditentukan dari satu komponen, melainkan ketiganya.

### Ekspresi Keruangan Morfologi Kota

Ekspresi keruangan morfologi kota berarti bentuk – bentuk dari morfologi kota itu sendiri yang meliputi batas fisik, penggunaan lahan, jaringan lahan serta pola bangunan yang ada. Bentuk keruangan morfologi kota tersebut ditampilkan pada tabel 1.

**Tabel 2. Kaitan antar komponen morfologi dalam ekspresi keruangan kota**

Bentuk Morfologi	Diagram Bentuk	Penggunaan Lahan	Pola jaringan jalan	Bangunan (kepadatan&pola)
<b>Konsentris</b>		Campuran, pusat kawasan satu di tengah	Radial konsentris, spinal, radial cincin	Kepadatan tinggi di pusat, homogen
<b>Memanjang</b>		Campuran, pusat kawasan satu (di sepanjang jalan)	Grid, spinal	Kepadatan tinggi di sepanjang jalan, heterogen
<b>Gurita</b>		Campuran, pusat kawasan satu (sepanjang jalan atau tengah)	Radial konsentris, radial cincin, spinal	Kepadatan tinggi di pusat dan sepanjang jalan, heterogen
<b>Tidak berpola</b>		Campuran, pusat kawasan tersebar	Tidak berpola	Kepadatan sedang, heterogen
<b>Berantai</b>		Campuran, pusat kawasan beberapa di sepanjang jalan	Grid, spinal	Kepadatan sedang berselang, heterogen
<b>Satelit</b>		Campuran, pusat beberapa (sepanjang jalan dan tengah)	Radial konsentris, radial cincin, spinal	Kepadatan tinggi pada pusat kawasan, heterogen
<b>Terbelah</b>		Campuran	Tidak berpola	Kepadatan sedang

Sumber: Tyas, dkk. (2013), Zahnd (2008), Yunus (2005), Burton (2002), Morlok (1991)

Ekspresi keruangan – keruangan tersebut akan membantu penelitian dalam mengkaji bentukan – bentukan morfologi yang ada di lokasi studi

## Teori Pertumbuhan Kota

Terdapat beberapa pandangan yang berkaitan dengan perubahan suatu kawasan dan sekitarnya sebagai bagian dari suatu kawasan perkotaan yang lebih luas, menurut Gallion dalam buku "The Urban Pattern" disebutkan bahwa perubahan suatu kawasan dan sebagian kota dipengaruhi letak geografis suatu kota. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perubahan akibat pertumbuhan daerah di kota tersebut, apabila terletak di daerah pantai yang landai, pada jaringan transportasi dan jaringan hubungan antar kota, maka kota akan cepat tumbuh sehingga beberapa elemen kawasan kota akan cepat berubah.

Dalam proses perubahan yang menimbulkan distorsi (mengingat skala perubahan cukup besar) dalam lingkungan termasuk didalamnya perubahan penggunaan lahan secara organik, terdapat beberapa hal yang bisa diamati yaitu:

1. Pertumbuhan terjadi satu demi satu, sedikit demi sedikit atau terus menerus.
2. Pertumbuhan yang terjadi tidak dapat diduga dan tidak dapat diketahui kapan dimulai dan kapan akan berakhir, hal ini tergantung dari kekuatan-kekuatan yang melatar belakangnya.
3. Proses perubahan lahan yang terjadi bukan merupakan proses segmental yang berlangsung tahap demi tahap, tetapi merupakan proses yang komprehensif dan berkesinambungan.
4. Perubahan yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam populasi pendukung.
5. Faktor-faktor penyebab perubahan lainnya adalah vision (kesan), optimalnya kawasan, penataan yang maksimal pada kawasan dengan fungsi-fungsi yang mendukung, penggunaan struktur yang sesuai pada bangunan serta komposisi tapak pada kawasan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan eksploratif bercirikan pencarian yang berlangsung secara menerus. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data & informasi. Dalam proses pengumpulan data & informasi, pendekatan eksploratif digunakan mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga eksplorasi data & informasi di lokasi studi yang dilakukan. Sifat pendekatan eksploratif yang menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi berdasarkan hasil temuan terakhir. Selain itu, Pendekatan *participatory* digunakan untuk memperoleh urutan prioritas pengembangan dan masukan-masukan dari berbagai *stakeholders* untuk melengkapi peta potensi yang sudah dihasilkan. Selain melalui wawancara, pendekatan *participatory* ini juga dilakukan dengan melalui pembahasan-pembahasan/seminar-seminar untuk mengkaji lebih lanjut hasil analisis yang dibuat. Pertimbangan menggunakan *participatory approach* adalah, bahwa saat ini pemaksaan kehendak dan perencanaan dari atas sudah tidak relevan lagi.

## Pengumpulan data

Untuk keperluan pengenalan karakteristik Kawasan perkotaan Mamuju dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data yang dihimpun pada tahap pengumpulan data meliputi:

1. Data kondisi fisik lingkungan;
2. Data penggunaan lahan;

3. Data peruntukan ruang;
4. Data prasarana dan sarana;
5. Data kependudukan;
6. Data perekonomian, sosial, dan budaya;
7. Data kelembagaan;
8. Data dan informasi pertanahan;
9. Peta dasar; dan
10. Data lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan. Data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada bagian dari wilayah kota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah sebesar 5.064,19 km<sup>2</sup> yang secara administrative terbagi kedalam 11 kecamatan. Kawasan Perkotaan Mamuju terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro. Kabupaten mamuju sendiri telah ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang kini telah berfokus kepada pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandara. Kabupaten Mamuju berbatasan langsung dengan selat Makassar dimana menjadi jalur perairan yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara dan Gorontalo

**Tabel 2. Luas wilayah kecamatan Kabupaten Mamuju**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1.	Tapalang	283,31
2.	Tapalang Barat	131,72
3.	Mamuju	206,64
4.	Simboro	111,94
5.	Balabalakang	21,86
6.	Kalukku	470,26
7.	Papalang	197,40
8.	Sampaga	119,40
9.	Tommo	827,35
10.	Kalumpang	1731,99
11.	Bonehau	962,12

Sumber: Hasil analisis, 2018

Penduduk di dalam suatu wilayah merupakan salah satu komponen yang membentuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam wilayah tersebut. Di samping itu, kegiatan yang ada di dalam suatu kota pun akan mempengaruhi dinamika penduduk yang tinggal di dalamnya baik secara kualitas maupun kuantitas. Berikut jumlah penduduk kabupaten Mamuju berdasarkan kecamatan

**Tabel 3. Jumlah penduduk per kecamatan kabupaten Mamuju**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )
1.	Tapalang	20.372	72
2.	Tapalang Barat	10.189	77

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )
3.	Mamuju	68.021	329
4.	Simboro	28.241	252
5.	Balabalakang	2.654	121
6.	Kalukku	58.577	125
7.	Papalang	23.939	121
8.	Sampaga	15.619	131
9.	Tommo	23.197	28
10.	Kalumpang	11.860	7
11.	Bonehau	9.589	10
<b>Total</b>		272.258	54

Sumber: Hasil analisis, 2018

Kawasan perkotaan Mamuju terdiri dari 2(dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju. Dari kecamatan tersebut, wilayah pendataan dibatasi dalam 6(enam) kelurahan ditunjukkan pada table 3 beserta jumlah penduduknya.

**Tabel 3. Kelurahan Kawasan Perkotaan Mamuju dan jumlah penduduk tahun 2017**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Binanga	22.780
2	Mamunyu	6.188
3	Rimuku	12.420
4	Karema	11.807
5	Simboro	9.418
6	Rangas	43.05
<b>Total</b>		66.918

Sumber: Hasil analisis, 2018

Setelah melakukan pendataan terhadap jumlah bangunan dilapangan, keseluruhan bangunan gedung yang berada disetiap kelurahan pada Kawasan perkotaan Kabupaten Mamuju memiliki fungsi yang bervariasi seperti Hunian, badam usaha, pendidikan, peribadatan, perkantoran, perhotelan, jasa, kesehatan, ruko, dan pergudangan. Jumlah masing-masing bangunan berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Jumlah bangunan berdasarkan fungsi**

Nama	Hunian	Badan Usaha	Pendidikan	Peribadatan	kantor	hotel	Jasa	Kesehatan	Ruko	Gedung	gudang	Jumlah
Kelurahan Mamunyu	906	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	910
Kelurahan Binanga	2438	413	15	19	48	3	-	4	113	-	1	3054
Kelurahan Rangas	543	2	2	2	7	-	-	0	-	-	-	556
Kelurahan Karema	1486	388	11	16	30	-	8	0	86	1	1	2027
Kelurahan Simboro	1536	58	6	9	31	-	7	3	83	-	-	1733
Kelurahan Rimuku	1327	266	9	18	34	-	1	1	16	-	-	1672

Sumber: Hasil survey, 2018

Data tersebut menunjukkan jumlah bangunan terbanyak berada di kelurahan Binanga dengan fungsi hunian mencapai 2438 bangunan. Selain itu, dengan fungsi badan usaha mencapai 413 bangunan. Bangunan yang berada di Kawasan perkotaan mamuju sudah menggunakan bangunan permanen yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Jumlah bangunan berdasarkan jenis bangunan**

<b>Nama</b>	<b>Permanen</b>	<b>Semi Permanen</b>	<b>Non Permanen</b>	<b>Jumlah</b>
Kelurahan Mamunyu	907	1	2	910
Kelurahan Binanga	2198	395	461	3054
Kelurahan Rangas	467	81	8	556
Kelurahan Karema	1502	199	326	2027
Kelurahan Simboro	1366	335	72	1773
Kelurahan Rimuku	1335	176	161	1672

Sumber: Hasil survey, 2018

Untuk non permanen paling banyak berada di kelurahan binanga mencapai 461 unit dan paling sedikit berada di kelurahan mamunyu yang hanya berjumlah 2 unit. Dari jumlah bangunan yang ada, tentu memiliki dampak terhadap lingkungan seperti pencemaran dan bencana. Adapun jumlah bangunan yang menghasilkan limbah domestik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Jumlah bangunan berdasarkan penghasil limbah domestik**

<b>Kelurahan</b>	<b>Limbah Domestik</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Jumlah</b>
Kelurahan Mamunyu	910	0	910
Kelurahan Binanga	2973	81	3054
Kelurahan Rangas	364	192	556
Kelurahan Karema	1983	44	2027
Kelurahan Simboro	1589	184	1773
Kelurahan Rimuku	1516	156	1672

Sumber: Hasil survey, 2018

Limbah domestik yang berasal dari penggunaan bahan pembersih rumah tangga juga berpotensi merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Jumlah bangunan penghasil limbah domestik terbanyak di kelurahan Binanga mencapai 2973 bangunan. Selain dampak lingkungan, adapun potensi bencana yang dihasilkan yaitu kebakaran. Walaupun kepadatan bangunan masih sangat rendah namun potensi kebakaran masih ada. Kepadatan bangunan per kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Kepadatan bangunan per kelurahan kawasan perkotaan Mamuju**

<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Bangunan</b>	<b>Luas Wilayah (Ha)</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Klasifikasi</b>
<b>Kelurahan Rangas</b>	556	3351,14	0,16	Sangat Rendah
<b>Kelurahan Simboro</b>	1773	809,8	2,19	Sangat Rendah
<b>Kelurahan Karema</b>	2027	6349,68	0,31	Sangat Rendah

<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Bangunan</b>	<b>Luas Wilayah (Ha)</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Klasifikasi</b>
<b>Kelurahan Rimuku</b>	1672	1065,81	1,56	Sangat Rendah
<b>Kelurahan Binanga</b>	3054	3407,49	0,89	Sangat Rendah
<b>Kelurahan Mamunyu</b>	910	5141,21	0,17	Sangat Rendah

Sumber: Hasil survey, 2018

Selain itu, Kebutuhan sarana dan prasarana dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang ada dikawasan perkotaan Mamuju. Berikut kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan jumlah penduduk Kota Mamuju:

**Tabel 8. Jumlah penduduk per Kelurahan Kawasan perkotaan Mamuju**

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>
<b>1</b>	Binanga	22.780
<b>2</b>	Mamunyu	6.188
<b>3</b>	Rimuku	12.420
<b>4</b>	Karema	11.807
<b>5</b>	Simboro	9.418
<b>6</b>	Rangas	43.05
<b>Total</b>		66.918

Sumber: Hasil survey, 2018

Kebutuhan sarana berdasarkan jumlah penduduk untuk Kawasan perkotaan mamuju yang berpotensi menjadi Kota Mamuju. Sarana yang dibutuhkan merupakan luas area yang akan dibangun sesuai standar kebutuhan masyarakat perkotaan. Luas sarana yang dibutuhkan tentu bervariasi sesuai dengan jenis fasilitasnya dan lokasi persebarannya disesuaikan dengan jumlah radius pelayanannya yang tentu membutuhkan kajian tersendiri. Berdasarkan perhitungan diatas, kota Mamuju akan membutuhkan sarana yang disesuaikan dengan jumlah per 65.000 penduduk dan berlaku kelipatan



**Tabel 9. Kebutuhan fasilitas berdasarkan jumlah penduduk**

No	Jenis Fasilitas	Sarana	Standar Jumlah Penduduk (jiwa)	Standar Luas Minimum (meter persegi)	Kebutuhan (meter persegi)	Keterangan (jumlah sebaran)
1	Pendidikan	TK	750	500	43.000	80 titik tersebar
		SD	1.500	3.000	130.000	43 titik tersebar
		SMP	15.000	4.000	17.300	4 titik tersebar
		SMA	30.000	4.800	10.400	2 titik tersebar
		Perguruan Tinggi	1.500.000	20.000	20.000	1 titik
2	Kesehatan	Puskesmas	30.000	500	1.083	3 titik tersebar
		Rumah Sakit	30.000	3.000	6500	2 titik tersebar
		Apotek	30.000	400	866	2 titik tersebar
3	Komersial	Warung	250	100	26.000	260 titik tersebar
		Tempat perbelanjaan	6.000	3.000	32.500	11 titik tersebar
		Pasar lingkungan	30.000	10.000	21.600	3 titik tersebar
		Pasar/pertokoan	60.000	10.000	10.800	1 titik
		Pusat perbelanjaan	480.000	36.000	36.000	1 titik
4	Sosial	Gedung serba guna	30.000	500	1083	2 titik tersebar
		Gedung pertemuan Umum	480.000	10.000	10.000	1 titik
		Masjid	30.000	2.000	4.300	2 titik tersebar
		Tempat ibadah lainnya	1.500.000	5.000	5.000	Dikondisikan
5	Hiburan	bioskop	30.000	2.000	4.300	2 titik tersebar
		Gedung kesenian	1.500.000	10.000	10.000	1 titik
		Lapangan olahraga	30.000	8.400	18.200	2 titik tersebar
		Kantor kelurahan	30.000	1.000	2000	2 titik tersebar
6	Pelayanan pemerintah	Pos keamanan	30.000	300	650	2 titik tersebar atau lebih
		Pos pemadam kebakaran	30.000	300	650	2 titik tersebar atau lebih
		Kantor pos	30.000	300	650	2 titik tersebar atau lebih
		Kantor kecamatan	200.000	3.750	3.750	1 titik
		Pengolahan sampah	3.000	400	8.600	22 titik tersebar

Sumber: Hasil analisis, 2018

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kota mamuju berpotensi dimekarkan dari 2 kecamatan dalam wilayah kabupaten mamuju yaitu kecamatan mamuju dan kecamatan simboro yang terdiri dari 6 kelurahan. Dengan dilakukannya pendataan bangunan gedung, dapat disimpulkan bahwa 2(dua) kecamatan yaitu Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro merupakan kecamatan terpadat yang ada di kabupaten mamuju dan berpotensi menjadi pusat kegiatan atau kota mandiri. Jumlah bangunan gedung dikedua kecamatan ini mencapai 9992 unit bangunan di 6(enam) kelurahan.

Dari 6(enam) kelurahan, kelurahan Binanga menjadi kelurahan yang paling padat dengan jumlah bangunan mencapai 3054 bangunan gedung dengan jumlah fungsi hunian mencapai 2438 unit rumah. Mayoritas letak bangunan di kabupaten mamuju berada di ketinggian rendah dan dimiliki sendiri.

Selain itu, dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap bangunan gedung berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan akibat belum adanya infrastruktur pengelolaan limbah.

Diantara 6(enam) kelurahan yang didata, kelurahan simboro menjadi kelurahan yang paling banyak menghasilkan limbah B3 dari 1681 bangunan dan kelurahan binanga menjadi kelurahan yang paling banyak menghasilkan limbah domestik dari 2973 bangunan. Tidak tertutup kemungkinan kecamatan tampa padang ikut menjadi bagian dari wilayah kota Mamuju kelak karena di kecamatan tampa padang terdapat bandara yang melayani provinsi Sulawesi barat dengan provinsi lainnya. kebutuhan fasilitas untuk mendukung kota Mamuju kelak juga perlu mendapatkan kajian dalam persebaran sarana tersebut. Kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarananya tentu akan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Dalam penelitian ini, penentuan luas area sarana tersebut bertambah per 65.000 penduduk.

## PERNYATAAN

Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan jurnal ini baik secara langsung maupun tidak langsung terutama kepada Panitia seleksi jurnal yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mirsa, Rinaldi. (2012). *Elemen tata ruang kota*. Yogyakarta, Indonesia: Graha ilmu.
- Tyas, W. I., Danial, D. M., & Izjrail, A. B. (2013). Kajian bentuk dan tatanan massa di kawasan bangunan Ci-Walk (Cihampelas Walk). *REKA KARSA*, 1(2), 1-11.
- Yunus, H.S. (2005). *Manajemen kota: perspektif spasial*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Yunus, H.S. (2000). *Struktur tata ruang kota*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Morlok, E. K. (1991). *Pengantar teknik dan perencanaan transportasi (introduction to transportation engineering and planning)*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga.
- Aditantri, R. (2018). Kajian morfologi kawasan permukiman terencana terdampak kegiatan perdagangan jasa studi kasus: Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Universitas Agung Podomoro, Jakarta.
- Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderlund, L., & Brizee, A. (2010, May 5). General format. Retrieved from <http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/>
- Brunner, I.M. (2016). Prediction of urban growth using the bucket model. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 227, 3-10.
- Chen, S., Chen, L., Liu, Q., Li, X., & Tan, Q. (2005). Remote sensing and GIS based integrated analysis of coastal changes and their environmental impacts in Lingding Bay, Pearl River Estuary, South China. *Ocean and Coastal Management*, 6 (48), 65-83.
- Kim, K., Brunner, I.M., & Yamashita, E. (2008a). Modeling violation of Hawaii's crosswalk law. *Accident Analysis and Prevention*, 40, 894-904.
- Kim, K., Brunner, I.M., & Yamashita, E. (2008b). Modeling fault among accident—Involved pedestrians and motorists in Hawaii. *Accident Analysis and Prevention*, 40, 2043-2049.
- Johnson, R.A., & Bhattacharyya, G.K. (2010). *Statistics: Principles and Methods* (6th ed). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.